



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Jombang Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Jombang disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Kecamatan Jombang Ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja Kecamatan Jombang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Jombang. Kinerja Kecamatan Jombang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Jombang Tahun 2023.

Demikian kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Jombang Tahun 2023.

21 Februari 2024
Kecamatan JOMBANG,

NUB/ADI.S.STP
Penata Tk.I
NIP. 19801124 200112 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dalam capaian kerjanya.

Sasaran yang dituju adalah Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pemerintah kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan koordinasi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan.

Laporan Kinerja OPD Kecamatan Jombang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja OPD Kecamatan Jombang tahun 2023 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Jombang Tahun 2023-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja OPD Kecamatan Jombang Tahun 2023.

Perubahan Renstra mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan OPD Kecamatan Jombang

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2023, yang meliputi:

1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam upaya meningkatkan Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Jombang dan Desa.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2023 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Jombang tahun 2023-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan mendapat predikat Nilai B (74,4) berdasarkan Kajian Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Administrasi Kependudukan Tahun 2023 kerja sama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jember dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jember.

Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi pemerintahan, Pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Dan Desa mendapat predikat Baik Hal ini dapat dilihat berdasarkan Hasil pengukuran Kinerja terhadap dua Indikator sasaran dengan capaian dua indicator tergolong sangat baik.

Dari uraian capaian indicator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh OPD Kecamatan Jombang telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 2 (dua) indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Baik**, indikator tidak dapat disimpulkan capaiannya karena tidak tersedia data. Tidak tersedianya data merupakan permasalahan yang perlu dirumuskan upaya dan solusi alternative dalam rangka pengukuran kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2023 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 3.427.455.027,-** merupakan Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp . 45.220.500,-** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 3.382.234.527,-** Sedangkan realisasi belanja Tidak langsung sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 41.302.200,-** atau **91,34 %** sedangkan untuk Belanja Langsung **Rp. 3.197.786.491,-** atau **94,55 %** dari pagu anggaran. Jadi realisasi anggaran Kecamatan Jombang sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 3.239.088.691,-** atau **94,50 %**.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target- target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2023 antara lain:

Bahwa secara umum kinerja dan penyerapan anggaran tahun 2023 tidak ada masalah sama sekali.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Perintah Pimpinan OPD / Camat Jombang untuk meningkatkan kinerja dan merealisasikan penyerapan anggaran secara maksimal.
2. Dalam penyusunan Rencana Anggaran selanjutnya seluruh program dan kegiatan akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta menyesuaikan dengan kebijakan yang terukur serta tepat waktu.
3. Penyusunan Program / Kegiatan sesuai dengan Schedule sehingga tidak menghambat pelaksanaan dan peng-SPJ-an.

Demikian Ikhtisar Eksekutif Kinerja Kecamatan Jombang yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2023 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2023.

21 Februari 2024
CAMAT KECAMATAN JOMBANG,

NURYADI S.STP
Pejabat Tk.I
NIP. 19800424 200112 1 003

DAFTAR ISI

1	
KATA PENGANTAR	2
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. LATAR BELAKANG.....	6
B. MAKSUD DAN TUJUAN	6
C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN JOMBANG.....	7
D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN JOMBANG	9
Tabel 1.1	9
periode Januari-Desember 2023	9
Jumlah ASN Kecamatan Jombang berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruangperiode Januari-Desember 2023	9
Jumlah ASN dan Non ASN Kecamatan Jombangberdasarkan Latar Belakang Pendidikan	10
E. ISU STRATEGIS	12
BAB II.....	13
A. RENCANA STRATEGIS.....	13
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023.....	17
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	19
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023	23
B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN JOMBANG	25
Tabel 3.2	26
Tabel 3.3	28
Tabel 3.4	28
B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN	33
Table 3.5	33
BAB IV.....	56
PENUTUP	56
A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA	56

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jombang dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Kecamatan Jombang.

Kinerja Kecamatan Jombang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Jombang tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Jombang dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Jombang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Jombang adalah:

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas

pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Jombang.

- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Jombang dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Jombang dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN JOMBANG

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Jombang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Jombang merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah.
- 2) Kecamatan Jombang oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerjanya.
- 3) Kecamatan Jombang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- 4) Kecamatan Jombang mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 5) Kecamatan jombang mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum
- 6) Kecamatan Jombang mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati
- 7) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan Umum
- 8) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di Kecamatan
- 9) Kecamatan Jombang Membina dan Mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa
- 10) Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan
- 11) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan
- 12) Kecamatan Jombang melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi Kecamatan Jombang terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan ;
 - Subbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
 - Subbag Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan;

- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN JOMBANG

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Kecamatan Jombang terdiri dari **12 ASN** dan **17 Non ASN**. Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Kecamatan Jombang :

Tabel 1.1
Jumlah ASN Kecamatan Jombang
berdasarkan Jabatan
periode Januari-Desember 2023

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Camat	1	ada
2	Sekretaris Camat	1	ada
3	Subbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	1	ada
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	1	ada
5	Seksi Pemerintahan	1	ada
6	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	ada
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	1	ada
8	Seksi Pelayanan Umum	1	ada
9	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-
Jumlah		8	

Tabel 1.2
Jumlah ASN Kecamatan Jombang
berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang
periode Januari-Desember 2023

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina	IV/a	1
2	Penata Tingkat I	III/d	3
3	Penata	III/c	2
4	Penata Muda Tingkat I	III/b	2
5	Penata Muda	III/a	-
6	Pengatur Tingkat I	II/d	2
7	Pengatur	II/c	-
8	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	
9	Pengatur Muda	II/a	1
10	Juru Tingkat I	I/d	1
11	Juru	I/c	-
12	Juru Muda Tingkat I	I/b	-
Jumlah			12

Tabel 1.3
Jumlah ASN dan Non ASN Kecamatan Jombang
berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
periode Januari-Desember 2023

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD	-	ASN
2	SLTP	-	ASN
3	SMA/STM	4	ASN
4	D3	-	ASN
5	S1	7	ASN
6	S2	1	ASN
7	SD	-	Non ASN
8	SLTP	1	Non ASN
9	SMA/STM	9	Non ASN
10	D3	-	Non ASN
11	S1	6	Non ASN
12	S2	-	Non ASN
Jumlah		28	

E. PROFIL KECAMATAN

Kecamatan Jombang terletak di wilayah Kabupaten Jember bagian Barat dengan luas wilayah 50.05 Km² Berbatasan sebelah Utara dengan kecamatan Sumberbaru sebelah Timur dengan kecamatan Umbulsari, Sebelah Selatan Kecamatan Kencong dan Sebelah Barat Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.

Jumlah penduduk di Kecamatan Jombang sebanyak 56.439 penduduk laki laki, dan sebanyak 28.344 penduduk perempuan. 28.095 penduduk memiliki mata pencaharian di bidang Pertanian 10.565 di bidang Wiraswasta 16.117 . Fasilitas layanan kesehatan yang tersedia terdapat 1 fasilitas kesehatan dasar yaitu Puskesmas Jombang dengan Status akreditasi Paripurna.

Secara administratif, Kecamatan Jombang membawahi 6 (Enam) Desa yaitu:

1. Desa Jombang
2. Desa Keting
3. Desa Ngampelrejo
4. Desa Wringinagung
5. Desa Padomasan
6. Desa Sarimulyo

Potensi desa di Kecamatan Jombang memiliki segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat dan tersimpan di desa. Tentunya sumber daya tersebut bisa dimanfaatkan untuk kelangsungan dan perkembangan desa. Adapun potensi desa salah satunya dalam bentuk pertanian. Seperti yang diketahui bersama, desa memiliki tanah yang begitu subur sehingga cocok dijadikan untuk pertanian. Karena pertanian ini begitu penting, maka bisa dikembangkan dengan baik. Peran pemerintah desa tentunya sangat diperlukan untuk menjamin kesejahteraan para petaninya.

Dalam hal tingkat kemandirian Desa, dari 6 (enam) Desa di Kecamatan Jombang dari Status 4 Desa dengan Status Desa Maju , dan 2 Desa dengan status Desa Mandiri

E. ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Jombang, yaitu:

- a) SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
- b) Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
- c) Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
- d) Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahamkan masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
- e) Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
- f) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- g) Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Kecamatan Jombang merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember, penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jombang mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke 2 (dua) dan tujuan yaitu :

- 1) Misi ke – 2 : *“Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya”*.
- 2) Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat.
- 3) Sasaran Strategis Kabupaten :
 - Meningkatnya Pelayanan publik yang merata dan berkualitas
 - Meningkatnya realisasi pajak dan retribusi daerah
 - Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat Desa.

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Kecamatan Jombang sebagaimana termuat didalam rencana Strategis Kecamatan Jombang Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

**MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN JOMBANG TAHUN 2021-2026**

Sebelum Perubahan :

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
Sebelum Perubahan								
1	Meningkatnya penataan Organisasi Pemerintah daerah dan Tata laksana penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik	85%	92%	94%	96%	98%
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	IKM	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	80%	85%	90%	95%	100%
		Terjaganya Masyarakat Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif, dan efisien		Nilai Sakip	80	83	85	88	88
		Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase realisasi Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%

Setelah Perubahan :

Tujuan 1 : Meningkatnya penataan Organisasi Pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Indikator Tujuan : Nilai IPP OPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	IPP		85%	92%	94%	96%	98%
	IKM		100	100	100	100	100
Meningkatnya fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	80%	85%	90%	95%	100%	100%
Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data : tabel Rencana Strategis Perubahan (T-C 25 dan T-C 27) pada Kecamatan Jombang

Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas pengelolaan keuangan dan Aset Daerah yang profesional,efektif,dan Efesien.

Indikator Tujuan : OPD Nilai Sakip

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip		80	83	85	88	88
	Persentase Indikator Program yang tercapai		100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data : tabel Rencana Strategis Perubahan (T-C 25 dan T-C 27) pada Kecamatan Jombang

Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat.

Indikator Tujuan : Indeks Pelayanan Publik.

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Tata Kelola yang baik melalui peningkatan peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada Masyarakat	a.IPP	72	74	76	77	79	80
SASARAN : 1.Meningkatkan kualitas pelayanan Aparatur Kecamatan	SKM Aparatur	95	95	96	97	98	99

2.Meningkatnya kemandirian dan peran masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Persentase peningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Restribusi						
3.Meningkatnya pemberdayaan Pemerintah Desa	Presentase Desa Mandiri pada Kecamatan Jombang						

Sumber data : Renstra Perubahan tahun 2021-2026 Kecamatan Jombang.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Jombang Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2023.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahun adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Kecamatan Jombang Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Kecamatan Jombang adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Sukowono	Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik yg merata & berkualitas	Sasaran 3 : Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Sasaran 4 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		
Indikator : Persentase Penyesaian Laporan Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Target : 100%)	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (Target : 100)	Indikator : Persentase Terfasilitasinya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Target : 100%)	Indikator : Nilai SAKIP (Target : A)		
Program Koordinasi Keterseraman dan Ketertiban Umum	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Pemerintahan & Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
Terlaksananya koordinasi ketertarikan dan ketertiban umum di tingkat kecamatan (Target : 100%)	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan (Target : 100%)	Terselenggarakannya Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Target : 100%)	Cakupan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan (Target : 100%)		
Seksi Ketentraman & Ketertiban	Seksi Pemerintahan	Seksi Pelayanan Umum	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, & Pelaporan	Sub Bagian Umum & Kepegawaian
Koordinasi Penerapan & Pemegakan Peraturan Daerah & Peraturan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Persentase Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Pemegakan Peraturan Daerah (Target : 100%)	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah (Target : 100%)	Persentase Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Target : 100%)	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa (Target : 100%)	Persentase Terselenggaranya proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD (Target : 100%)	Persentase Terlaksananya administrasi BMD di PD (Target : 100%)
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Persentase Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Target : 100%)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan (Target : 100%)		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Keuangan Perangkat Daerah (Target : 100%)	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Target : 100%)
					Persentase Terlaksananya Administrasi Umum (Target : 100%)
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Paket BMD yang diadakan (Target : 18 Paket)
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemda (Target : 100 %)
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Unit BMD dalam Kondisi Baik (Target : 100 Unit)

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Kecamatan Jombang sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jombang yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Jombang Nomor : 065/ 25 /35.09/2023 Tahun 2023

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana peyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Tersedianya 4 Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Daerah 1. LAKIB 2. RB 3. ANJAB 4. Pelayanan Publik	Camat	-
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Penilaian Pelayanan Masyarakat Melalui Sistem Informasi	Semua bidang Seksi : - Pemerintahan - Pelayanan Umum - PMKS - Trantib	SUKMA-E
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat Yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi ———— X 100% Jumlah kegiatan pemberdayaan	Seksi Pemebrdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat
Terjaga ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum Serta Ketentraman Masyarakat	Jumlah Laporan/Aduan Pelanggaran ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat yang di selesaikan ———— X 100% Jumlah laporan/aduan pelanggaran Ketertiban umum dan ketenraman masyarakat yang masuk	Seksi trantib	Dokumen Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan
Meningkatnya Kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang provesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIB OPD		- Camat	Hasil review dokumen SAKIp Perangkat Daerah

Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Tarjet Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Indikator Progarm Yang tercapai	Jumlah indikator program yang tercapai. _____ X 100% Jumlah Indikator Program	Sekcam	LAKIP
---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------

Sumber data : IKU 2023 Kecamatan Jombang.

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir).

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Jombang Tahun 2023 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Kecamatan Jombang tahun 2023 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kecamatan Jombang tahun 2021-2026.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023
1.	Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Jombang	Persentase Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan Jombang	IKM	85
3	Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Jombang	Persentase Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	100%
4	Terselenggaranya Pemerintahan Kecamatan Jombang	Nilai Sakip	B

Sumber data : PK Perubahan 2023 Kecamatan Jombang.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Kecamatan Jombang didukung dengan anggaran APBD sebesar Rp. **3.427.455.027** (tiga milyar empat ratus dua puluh tujuh empat ratus lima puluh lima ribu dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian :

1. program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2023 sebesar Rp. 2.321.886.527 (dua milyar tiga ratus dua puluh satu delapan ratus delapan puluh enam lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tahun 2023 sebesar Rp. 649.823.800 (Enam ratus enam puluh sembilan delapan ratus dua puluh tiga delapan ratus ribu rupiah);
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tahun 2023 sebesar Rp. 48.327.600 (empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh enam ratus ribu rupiah);
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2023 sebesar Rp. 398.186.700

(Tiga ratus sembilan puluh delapan seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Jombang dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Kecamatan Jombang menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 - 70	Baik
5.	CC	➤ 50 - 60	Cukup (mamadai)
6.	C	➤ 30 - 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.

3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :

- A. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- B. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin

tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi-Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN JOMBANG

B.1 ANALISA REALISASI KINERJA

Kecamatan Jombang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Jombang tahun 2021-2026. Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) Tujuan, 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2023.

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Jombang	1	Persentase Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum Serta Ketentraman Masyarakat	100%	95%	95%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di kecamatan Jombang	2	IKM	85	85	100%
3	Terselenggaranya Pemerintah Kecamatan Jombang	3	Nilai Sakip	B	B	100%
4	Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Jombang	4	Persentase Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	100%	85%	85%
RATA RATA CAPAIAN						95%

Sumber Data:

1. Perjanjian Kinerja
2. Indek Kepuasan Masyarakat (E Sukma)

3. Laporan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat
4. Laporan penanganan pengaduan trantibum

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 4 (empat) indikator sasaran Kecamatan Jombang rata rata mencapai 95% dan masuk dalam kategori Sangat Memuaskan Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Jombang telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Jombang tahun 2021 -2026. Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET			REALISASI		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2		3	4		5	6
Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Jombang	Persentase Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum Serta Ketentraman Masyarakat		100	100	-	90	95
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di kecamatan Jombang	IKM		100	85	-	80	85
Terselenggaranya Pemerintah Kecamatan Jombang	Nilai Sakip	-	-	B	-	B	B
Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Jombang	Persentase Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	-	100%	100%	-	80%	85%

Sumber Data:

1. Perjanjian Kinerja
2. Indek Kepuasan Masyarakat (E Sukma)

3. *Laporan Konsistensi SKPD kecamatan Jombang Tahun 2022 (SIPPD)*
4. *Laporan Konsistensi SKPD kecamatan Jombang Tahun 2023 (SIPPD)*

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Kondisi Yang Harus Dicapai Pada Tahun 2023 berdasarkan target pada Rencana Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA TH. 2026	REALISASI Th. 2023	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terjaganya Ketentraman Umum dan Ketentraman Masyarakat Jombang	Persentase Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum Serta Ketentraman Masyarakat	100%	95%	95%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di kecamatan Jombang	IKM	85	85	100%
3	Terselenggaranya Pemerintah Kecamatan Jombang	Nilai Sakip	BB (97)	B	
4	Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Jombang	Persentase Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	100%	95%	95%

Sumber Data:

1. *Perjanjian Kinerja*
2. *Indek Kepuasan Masyarakat (E Sukma)*
3. *Laporan penanganan pengaduan trantibum*
4. *Laporan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat*

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2023	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terjaganya Ketentraman Umum dan Ketentraman Masyarakat Jombang	Persentase Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum Serta Ketentraman Masyarakat	95	-	-

2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di kecamatan Jombang	IKM	85	-	-
3	Terselenggaranya Pemerintah Kecamatan Jombang	Nilai Sakip	B	B (63,36) Rata rata nilai SAKIP Kab/Kota tahun 2023	-
4	Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Jombang	Persentase Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	100%	-	

Dari tabel 3.1 s/d 3.4, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan Jombang

Indikator : Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat

Jumlah laporan pada seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada tahun 2023 terdata sebanyak 5 (Lima) Laporan, antara lain:

1. Laporan Bencana karena banjir 1 kali

Luapan sungai pladingan yang melintasi wilayah dusun krajan II desa ngampelrejo.yang berdampak menggenangi perumahan warga selama 2 hari.

Solusi :

- Mengungsikan warga yang berdampak ke sanak keluarganya dan sebagian diungsikan ke fasum (Balai Desa Ngampelrejo)
- Melaporkan kejadian tersebut ke BPBD Kabupaten Jember untuk mendapatkan bantuan sarana dan prasarana serta alat evakuasi.
- Melaporkan ke Dinas Sosial kabupaten Jember untuk mendapatkan Logistik yang diperlukan

2. Laporan karena minuman keras di tempat umum 2 kali

Adanya kerumunan anak2 muda setiap malam di warung2 lesehan di wilayah Desa Keting yang melakukan minum miras.

Solusi :

- Melakukan Patroli rutin dengan instansi terkait (Kepolisian,TNI, dan Pemerintah Desa setempat
- Memberikan arahan dan peringatan kepada pemilik warung,pramusaji dan pengunjung untuk tidak menjual dan meminum miras serta bagi pramusaji supaya berpakaian sopan.
- Memberlakukan Jam Tutup Warung lesehan sampai jam 24.00 WIB.

3. Laporan karena ODGJ 1 kali

Adanya ODGJ yang mengganggu pengguna Jalan di perempatan Masjid Jami' Al Huda Jalan Ki Hajar Dewantara Desa Jombang.

- Mendatangi danengefakuasi ODGJ dimaksud

4. Laporan kegiatan konflik antar warga 1 kali

Keberadaan Kandang Ayam Potong di Krajan III Desa Jombang, yang mengganggu masyarakat sekitar (Bau dan Perkembangan Lalat)

Solusi :

- Mendatangi Lokasi Kandang Ayam potong yang diadakan, dengan maksud untuk melihat secara dekat dan Dampak yang ditimbulkan.
- Memanggil kedua belah pihak untuk dimintai keterangan dan mendapatkan kesepakatan untuk menutup sementara kegiatan peternak ayam potong dimaksud.

Sebanyak 100% laporan telah tertangani dibawah koordinasi Camat Jombang sesuai standar operasional prosedur (SOP) penanganan laporan pelanggaran, dengan melibatkan seluruh pihak terkait yaitu perangkat desa dan muspika. Beberapa laporan yang tidak tertangani sesuai SOP antara lain terkait (Nihil) Yang disebabkan(Nihil)

Dari table 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2023 yaitu 100% telah tercapai dengan kategori SANGAT MEMUASKAN. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (table 3.3), maka target pada akhir periode renstra (tahun 2026) tercapai optimal pada tahun ke-3 periode renstra. Sedangkan dari table 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar nasional untuk indikator kinerja Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan Jombang

Indikator : IKM

IKM diukur secara berkala di Kecamatan Jombang dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi SUKMA-e. Pemanfaatan pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan untuk memperoleh umpan balik perbaikan atas pelayanan publik yang dilaksanakan.

Pelayanan Kecamatan Jombang sesuai tugas dan fungsinya antara lain pelayanan surat keterangan, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan fasilitasi pengelolaan dana desa, pemberian pelatihan, fasilitasi pendistribusian bantuan, pelayanan administrasi pertanahan, Pelayanan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, koordinasi dengan pemerintah desa;

Dari table 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2023 yaitu 85% tercapai dibawah target. Dibandingkan dengan realisasi tahun lalu maka terdapat kenaikan IKM dari 80 menjadi 85. sebagaimana tersaji pada tabel 3.2. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (table 3.3), maka target pada akhir periode renstra (tahun 2026) tercapai pada tahun ke-3 periode renstra.

Dari tabel 3.4 tidak dapat disimpulkan hasil perbandingan dengan realisasi nasional, karena tidak ada realisasi nasional maupun regional jawa timur kabupaten terkait indikator ini. Namun dibandingkan IKM kabupaten Jember tahun 2023 sebesar 86,34 , realisasi IKM Kecamatan Jombang dibawah realisasi Kabupaten, dengan selisih 1,34, dan ikut mendukung capaian IKM Kabupaten Jember.

Sasaran Strategis 3 : Terselenggaranya Pemerintahan Kecamatan Jombang

Indikator : Nilai SAKIP

- Indikator keberhasilan sasaran ini diukur dari nilai SAKIP. Nilai SAKIP merupakan nilai Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Kecamatan Jombang , dimana evaluasi atas implementasi SAKIP dilakukan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Jombang Tahun 2023 adalah B atau kategori B Hasil tersebut menunjukkan capaian yang sangat memuaskan karena telah sesuai dengan target yang ditetapkan.
- Di tahun 2023 target kinerja B dengan realisasi kinerjanya masuk kategori 100% (sangat memuaskan). Dibandingkan dengan tahun 2022 target kinerja B dengan realisasi nilai SAKIP B maka ada ~~B~~ kenaikan nilai evaluasi menunjukkan adanya perbaikan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah di tabel 3.3, maka target pada akhir periode renstra (2021-2026) tercapai pada tahun ke-3 periode renstra. Dari tabel 3.4 dapat disimpulkan bahwa nilai SAKIP Kecamatan Jombang telah melebihi angka rata rata nasional dari hasil evaluasi SAKIP seluruh Pemerintah Kabupaten/ Kota yaitu 63,36 dengan kategori B dan capaian Kecamatan Jombang telah sama dengan kategori nilai SAKIP Kabupaten dengan kategori B.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Jombang

Indikator : Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan

Dari table 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2023 yaitu 85% telah tercapai dengan kategori MEMUASKAN. Berdasarkan data perencanaan pada seksi PMKS, pada tahun 2023 terdapat Kegiatan fasilitasi kesejahteraan masyarakat sebanyak 24 Kegiatan, antara lain terdiri dari :

- Kegiatan sosialisasi pelatihan kader PKK sebanyak 8 kegiatan
- Kegiatan Stunting, AKI, AKB & Akbal & Pengarusutamaan gender sebanyak 4 kegiatan
- Kegiatan verval penerima bansos sebanyak 1 kegiatan
- Bantuan langsung tunai dari anggaran DBHCHT (dana bagi hasil cukao hasil tembakau) sebanyak 2 kegiatan
- Bantuan beras dari Bulog sebanyak 6 kegiatan
- Bantuan permakanan Lansia dan disabilitas sebanyak 3 kegiatan (Bulan)

Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (table 3.3), maka target pada akhir periode renstra (tahun 2026) tercapai optimal pada tahun ke-3 periode renstra.

Sedangkan dari table 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar nasional untuk indikator kinerja Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan

Mengacu capaian Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 yang didasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian 4 (empat) indikator sasaran Kecamatan Jombang rata rata mencapai 94.60 % dan masuk dalam kategori memuaskan dan perlu ditingkatkan dengan membangun budaya kerja yang positif dan kolaboratif baik dilingkungan Organisasi maupun dalam pelayanan publik

B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 3.5
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2023

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Terjaganya Ketentraman Umum dan Ketentraman Masyarakat Jombang								
Persentase Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum Serta Ketentraman Masyarakat	95%	v						
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di kecamatan Jombang								
IKM	100%	v						

Terselenggaranya Pemerintah Kecamatan Jombang								
Nilai Saki	100%	v						
Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Jombang								
Persentase Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	85%		v					

Dari table 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2023, secara umum realisasi kinerja PD Kecamatan Jombang dalam kategori **Sangat Memuaskan**

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indicator kinerja dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 :

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah adalah 100% dengan Capaian Kinerja 99 % dari Target Jangka Menengah Pada Renstra tahun 2026 adalah 85 % sehingga dalam capaian kinerja tahun 2023 masuk kategori Memuaskan , dan terdapat peningkatan realisasi capaian kinerja dari 88 % Tahun 2022 dan pada tahun 2023 dengan realisasi 96,83 % ,

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan yang menjadi permasalahan

1. terdapat kendala atau hambatan dalam implementasi program dan kegiatan akibat perubahan regulasi dan kebijakan.
2. adanya permasalahan koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektoral.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam rencana strategis ke depan, antara lain:

1. Melakukan evaluasi dan penyesuaian target kinerja agar lebih realistis dan terukur.
2. Meningkatkan koordinasi antar Seksi terkait pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Melakukan kajian kebutuhan sumber daya manusia dan anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja.
4. Meningkatkan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi permasalahan dan langkah perbaikan.
5. Melakukan perbaikan internal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan capaian kinerja perangkat daerah dapat kembali meningkat dan bahkan melampaui target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Sasaran Strategis 2 :

Capaian kinerja kepuasan masyarakat atas pelayanan publik di Kecamatan Jombang pada tahun 2023 sebesar 80,67% merupakan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 72%. Hal ini menunjukkan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Jombang mulai membuahkan hasil meskipun capaian ini masih berada di bawah target jangka menengah sebesar 100% pada tahun 2026.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya target 100% tersebut adalah:

- Kualitas pelayanan publik wilayah di Kecamatan Jombang belum Optimal diantaranya yaitu petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan dan kemampuan petugas dalam pelayanan;
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan publik dalam hal tidak memiliki jaringan telekomunikasi yang memadai, seperti sinyal akses internet lemah dan perangkat Komputer yang kurang memenuhi standar
- Kapasitas dan kompetensi SDM penyelenggara pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.

Untuk meningkatkan capaian target ini, beberapa rencana strategi yang dapat dilakukan adalah:

- Melakukan standarisasi Operasi prosedur dan persyaratan pelayanan publik di Kecamatan Jombang.
- Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan publik terutama di Kantor Kecamatan Jombang yang masih belum memadai dengan menambah jaringan internet dan kuota internet khusus untuk pelayanan dan meng upgrade semua perangkat komputer
- Melaksanakan pelatihan secara berkala bagi SDM penyelenggara layanan untuk meningkatkan kapasitasnya.
- Memperluas layanan berbasis digital untuk menjangkau masyarakat lebih luas.
- Melakukan survei kepuasan masyarakat (E Sukma) secara berkala untuk mengetahui kelemahan dan memperbaiki kualitas pelayanan.

Dengan upaya-upaya tersebut, target 100% kepuasan masyarakat Kecamatan Jombang pada tahun 2026 diharapkan dapat tercapai.

Sasaran Strategis 3 :

Capaian sasaran Strategis Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan adalah 100 % dengan Capaian Kinerja 100 % dari Target Jangka Menengah Pada Renstra tahun 2026 adalah 100 % sehingga dalam capaian kinerja tahun 2023 masuk kategori Memuaskan.

Dalam mencapai Sasaran Strategis tersebut tidak lepas adanya sinergi antar stakeholder di Kecamatan Jombang, seperti Koramil dan Babinsa, kader posyandu dan tokoh masyarakat. Sinergi antar stakeholder tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti komunikasi dan koordinasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, pemanfaatan sumber daya, dan pembentukan jaringan kerja. Sedangkan perolehan Pajak PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi untuk tahun 2023 mencapai PBB 49,85 % dapat tercapai dengan menyelenggarakan program-program edukasi untuk meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya pajak bagi pembangunan desa. Selain itu, pemerintah kecamatan dan desa juga dapat memanfaatkan teknologi untuk memudahkan proses penerimaan pajak dan meningkatkan system pengawasan penerimaan pajak (dengan melakukan Monev setiap triwulan di desa – desa). Dengan adanya sinergi antar stakeholder, diharapkan dapat tercipta program-program pemberdayaan masyarakat desa yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahun yang akan datang

Untuk meningkatkan target capaian kinerja tahun ke depan, Kecamatan perlu melakukan beberapa hal, antara lain:

- Mengevaluasi dan memperbaiki program dan kegiatan yang kurang efektif atau efisien dalam meningkatkan fasilitas kesejahteraan masyarakat.
- Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya, atau fasilitas.
- Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan fasilitas kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mengambil bagian dalam program dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan sistematis.

Sasaran Strategis 4 :

Capaian kinerja Kecamatan dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di tahun 2023 telah mencapai 96%, yang merupakan hasil yang memuaskan. Capaian ini menunjukkan bahwa Kecamatan telah berhasil melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategisnya, seperti pelaksanaan patroli rutin, penyusunan identifikasi dan potensi kerja sama di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak-anak, peningkatan partisipasi pemuda, pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Untuk meningkatkan target capaian kinerja tahun ke depan perlu melakukan beberapa hal, antara lain:

- Mengevaluasi dan memperbaiki program dan kegiatan yang kurang efektif atau efisien dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya, atau fasilitas.
- Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mengambil bagian dalam program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan sistematis.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaporan program dan kegiatan, serta menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.

Dengan melakukan hal-hal di atas, diharapkan Kecamatan dapat meningkatkan capaian

kinerja dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Jombang pada tahun 2023 didukung 4 (empat) Program 4 (empat) Kegiatan dan 7 (tujuh) Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan Jombang tahun 2023

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
	Input : Dana yang dibutuhkan	1.731.468.142	1.566.177.343	83%
	Output : Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN selama 12 bulan	18 orang	12 Orang	94%
	Outcome : Terwujudnya kesejahteraan ASN			
	sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
	Input : Dana / Anggaran	110.030.000	109.150.000	91%
	Output : Laporan keuangan SKPD yang telah ditelaah dan diverifikasi	12 dokumen	12 dokumen	100 %
	Outcome : Laporan keuangan SKPD			

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
	yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan			
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			
	Input : Dana yang dibutuhkan	32.500.000	35.500.000	100%
	Output : Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	100%
	Outcome : Terwujudnya pemerintahan yang profesional dan akuntabel			
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
	Input : Dana yang dibutuhkan	56.880.000	55.739.207	84%
	Output : Jasa pelayanan umum kantor yang sesuai dengan kebutuhan	4 Laporan	4 Laporan	100%
	Outcome : Terwujudnya pemerintahan yang profesional dan akuntabel			
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Input : Dana yang dibutuhkan	63.908.500	55.350.285	82%
	Output : Laporan pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas	2 unit	2 unit	100%
	Outcome : Terwujudnya pemerintahan yang profesional dan akuntabel			
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik			

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	Input : Anggaran belanja untuk pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	26.966.200	26.782.450	90%
	Output : Laporan pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 unit	2 unit	100%
	Outcome : Terwujudnya pemerintahan yang profesional dan akuntabel			
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
	Input : Anggaran belanja untuk pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	81.958.200	81.614.150	99%
	Output : Gedung kantor dan bangunan lainnya yang terawat atau telah direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%
	Outcome : Terwujudnya pemerintahan yang profesional dan akuntabel			
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	Input :-Dana yang dibutuhkan	258.000	250.000	90%
	Output : Penyusunan Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
	perencanaan SKPD			
	Outcome : Tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah			
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Input : Dana yang dibutuhkan dan Data kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	17.125.700	16.008.450	90%
	Output : Peralatan dan perlengkapan kantor yang sesuai dengan kebutuhan	1 Paket	1 Paket	100%
	Outcome : Terwujudnya pemerintahan yang profesional dan akuntabel			

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
a	sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Input : Dana / Anggaran	77.838.000	75.941.336	99%
	Output : Jumlah Laporan Peyelngaraan Rapat SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Outcome : Tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah			

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
a	sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
	Input : Dana / Anggaran	9.230.400	8.882.000	90%
	Output : Terlaksananya peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	88	80,67	100%
	Outcome : Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat			

Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kantor Kecamatan Jombang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dan terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih

Rapat Koordinasi

1. Dilaksanakan 15 kali dalam satu Anggaran
2. Bentuk kegiatan : Rapat Koordinasi
3. Peserta Kegiatan, Muspika, Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala Instansi Lintas Sektoral, Tokoh masyarakat dan Tokoh Agama.



Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan di Kantor Kecamatan Jombang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, sehingga dapat mencapai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dan terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (pelum)



Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
a	sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
	Input : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan	644.400.000	644.400.000	100%
	Output : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas	12	12	100%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
	Kegiatan Pemerintahan			
	Outcome : Tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan desa			
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
b	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
	Input :	136.867.000	121.425.500	89%
	Output : Terlaksananya peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat	20	20	100%
	Outcome : Terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera			

Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa bertujuan untuk mengintegrasikan secara langsung keinginan dan kebutuhan masyarakat desa ke dalam perencanaan kegiatan pembangunan yang selaras dengan potensi sumber daya lokal. Sub kegiatan ini melibatkan pemerintah desa, dewan penasihat desa, dan warga setempat sebagai peserta Musrenbangdes. Sub kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat desa dalam pembangunan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan Desa.

Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa meliputi beberapa tahapan : Persiapan musrenbangdes, penyiapan dokumen, serta penentuan waktu dan tempat musrenbangdes, Evaluasi dan laporan Murenbangdes (Meliputi evaluasi proses dan hasil musrenbangdes, penyusunan laporan musrenbangdes, dan penyampaian laporan musrenbangdes).

Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah

Kecamatan. Sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan hasil dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, dan desa di wilayah Kecamatan Jombang. Sub kegiatan ini melibatkan camat sebagai koordinator yang melakukan sinkronisasi, fasilitasi, dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sub kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan desa diantaranya dengan melaksanakan Pembinaan Pengurus Karang Taruna, Pembinaan Puskesmas, Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Bagi Pik-R /Fad, Sosialisasi Pencegahan Pms/lms Dalam Rangka Penurunan AKI/AKB



Sasaran Strategis 4 Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			
	Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
	sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
	Input : Koordinasi Penerpan dan Penegakan Peraturan	362.400.000	358.800.000	97%
	Output : Laporan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi koordinasi	12	12	100%
	Outcome : Terciptanya kondisi ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat			

Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Pembinaan Linmas Se-wilayah Kecamatan Jombang Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Bidang Ketentraman dan Ketertiban, Kecamatan Jombang menyelenggarakan kegiatan Pembinaan untuk anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang ada di wilayah Kecamatan Jombang, bertempat di Aula Wisnu Graha Kantor Kecamatan Jombang. Kegiatan Pembinaan Linmas ini diikuti oleh perwakilan Linmas dari desa-desa se-Kecamatan Jombang DAN Sub kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, maka akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Patroli ke Wilayah Kecamatan Jombang dan Pemantauan NATARU Bersama 3 Pilar



Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub kegiatan ini bertujuan untuk membantu pemerintah desa dalam membuat peraturan desa (Perdes) dan peraturan kepala desa (Perkades) yang sesuai dengan kaidah hukum dan teknik penyusunan. Sub kegiatan ini melibatkan camat sebagai fasilitator yang melakukan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap proses penyusunan Perdes dan Perkades. Sub kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas Perdes dan Perkades yang menjadi acuan pelaksanaan pemerintahan desa

Jenis Kegiatan : Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES).

1. Dilaksanakan 1 kali dalam satu Anggaran
2. Bentuk kegiatan :
 1. Pelatihan/Bimbingan Teknis penyusunan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES).

2. Peserta Kegiatan, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Perencanaan, Operator Desa dan Kasi Kesra sebagai Pelaksana Kegiatan (PK) dari Desa-desa se Kecamatan Jombang
3. Materi pelatihan,
 - Tata cara pelaksanaan, penyusunan dan pelaporan RKP Desa
 - Tata cara pelaksanaan, mekanisme, penyusunan dan penetapan APB Desa
 - Teknis Pembuatan RAB

Out Put kegiatan :

- a. peserta mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tahapan penyusunan RKP Desa
- b. peserta mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tahapan penyusunan dan penetapan APB Desa Tepat waktu

Peserta khususnya PK dapat membuat RAB kegiatan



Sub kegiatan ini bertujuan untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dan aset desa sesuai dengan kaidah hukum dan teknik pengelolaan. Sub kegiatan ini melibatkan camat sebagai fasilitator yang melakukan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap proses pengelolaan keuangan desa dan

pendayagunaan aset desa. Sub kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan keuangan desa yang baik, tertib, transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang profesional, responsif, dan akuntabel di tingkat desa.

Sub kegiatan ini meliputi beberapa tahapan, yaitu:

Jenis Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi penggunaan DD, ADD BGH.

1. Dilaksanakan di tujuh Desa yang ada di Kecamatan Jombang yakni Desa Pontang, Andongsari, Sabrang, Sumberejo, Tegalsari, Ambulu dan Karanganyar
2. Bentuk kegiatan :
 - a. Pembinaan Administrasi keuangan desa, monitoring penyusunan Surat pertanggungjawaban (SPJ) setiap tahapan pencairan DD, ADD dan BGH P/R.
 - b. Pengecekan lokasi pelaksanaan pembangunan fisik
3. Dilaksanakan 3 kali dalam setahun
4. Out Put kegiatan : dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi

B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Jombang adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Terselenggaranya Pemerintah Kecamatan Jombang	100%	98%	Efisien
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	100%	99,8% 98%	Efisien
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	85%	99,8% 90%	Efisien
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	95%	98%	Efisien

Sumberdaya Manusia Kecamatan Jombang berjumlah 12 orang dengan rincian 8 pejabat struktural dan 4 pelaksana.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi terbagi menjadi 4 sasaran yaitu

Sasaran 1 Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah dalam Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan Daerah didukung anggaran sebesar Rp. 2.595.215.039 ,- dan terserap sebesar Rp. 2.165.735.684,00 ,-;

Sasaran 2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan dalam Program urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didukung anggaran sebesar Rp. 1.046.364.300,- dan terserap sebesar Rp. 1.029.882.500,-;

Sasaran 3 Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang menjadi kewenangan Daerah didukung anggaran sebesar Rp. 143.585.800,- dan terserap sebesar Rp. 127.184.300,-;

Sasaran 4 Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan dalam Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan Daerah didukung anggaran sebesar Rp. 244.317.700,- dan terserap sebesar Rp. 237.930.000,-, dan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Daerah didukung anggaran sebesar Rp. 13.442.600,- dan terserap sebesar Rp. 11.537.500,-,

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Jombang dengan rata-rata capaian Kinerja 84 %

Pada tahun 2023, karena kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Jember terdapat refocusing anggaran pada P-APBD 2023 di Kecamatan Jombang sebesar Rp. 3.427.455.027, antara lain pengurangan pada :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sebesar Rp.2.321.886.527,
- b. Program Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik Sebesar Rp.649.823.800.
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sebesar Rp.48.327.600.
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Sebesar Rp.398.186.700.
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sebesar Rp.9.230.400 .

REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jombang , pada tahun anggaran 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 4.042.925.439 ,- Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp 3.955.085.539 ,-
2. Belanja Modal sebesar Rp 87.839.900 ,-

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 5 (lima) program dan 10 (sepuluh) kegiatan Kecamatan Jombang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

Tabel 3.8
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2023

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.321.886.527	2.137.642.091	92%
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.841.748.142	1.675.577.343	91%
	sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.731.468.142	1.566.177.343	90%
	sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110.030.000	109.150.000	99%
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.500.000	32.500.000	100%
	sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32.500.000	32.500.000	100%
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.929.785	88.715.147	99%
	sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	56.880.000	55.739.207	98%
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.832.900	173.120.610	95%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
	sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	63.908.500	55.350.285	87%
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.832.900	173.120.610	95%
	sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.966.200	26.782.450	99%
	sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	81.958.200	81.614.150	99%
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	508.000	500.000	98%
	sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	258.000	250.000	97%
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	129.147.200	125.926.791	98%
	sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.125.700	16.008.450	93%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	649.823.800	649.790.000	99%
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	644.400.000	644.400.000	100%
	sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.275.000	9.234.000	99%
	sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.275.000	9.234.000	99%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	48.327.600	48.286.600	99%
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13.547.600	13.506.600	99%
	sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.272.600	4.272.600	100%
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan			

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
	Pemberdayaan Desa	13.547.600	13.506.600	99%
	sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.275.000	9.234.000	99%
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.155.748.711	394.488.000	34%
	Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.119.962.011	358.800.000	32%
	sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	362.400.000	358.800.000	99%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Kecamatan Jombang pada tahun 2023 sebesar Rp. 3.239.088.691,- dari total sebesar Rp. 4.185.017.038,- atau 88,4 %. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2022 maka mengalami penurunan sebesar 6,9 % yaitu pada tahun 2022 dari total anggaran sebesar Rp. 3.808.233.369,- terealisasi sebesar Rp 3.596.844.312,- atau 94,45 %. penurunan ini disebabkan karena meningkatkan belanja Gaji Pagunya besar dan efisensi Anggaran.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA

Dalam tahun 2023 Kecamatan Jombang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Kecamatan Jombang tahun 2021-2026

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Jombang dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Sangat Memuaskan** karena dari 4 (empat) sasaran dengan 3 indikator pencapaiannya dalam kategori Sangat Memuaskan, dan 1 indikator dengan capaian Memuaskan.

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. **3.239.088.691** (94,50%) meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.197.786.491 (94,55%)

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Jombang masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan. dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut : Kendala atau hambatan :

Bahwa secara umum kinerja dan penyerapan anggaran tahun 2023 tidak ada masalah/ hambatan yang cukup berarti namun demikian untuk pos belanja telepon listrik masih menyisakan anggaran. Sedangkan alokasi anggaran untuk pos belanja lembur tidak bisa terserap karena tidak bisa ter- SPJ kan.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2023 dan tahun – tahun berikutnya antara lain melalui :

1. Perintah Pimpinan OPD / Camat Jombang untuk meningkatkan kinerja dan merealisasikan penyerapan anggaran secara maksimal.
2. Dalam penyusunan Rencana Anggaran selanjutnya seluruh program dan kegiatan akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta menyesuaikan dengan kebijakan yang terukur serta tepat waktu.
3. Penyusunan Program / Kegiatan sesuai dengan Schedule sehingga tidak menghambat pelaksanaan dan peng-SPJ-an.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Jombang yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2023 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2023.

Jember, 21 Februari 2024

KABUPATEN JOMBANG,



NURYADI S.STP

Penasihat Tk.I

NIP. 19801124 200112 1 003

DAFTAR LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JOMBANG

JL. Ahmad Yani NO.104 ☎ (0336) 322155 JOMBANG
Kode Pos : 68168

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2023**

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembagunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya pelayanan public yang merata dan berkualitas	Meningkatkan Tatakelola yang baik melalui Peningkatan peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada Masyarakat	Meningkatnya pelayanan Publik yang merata dan berkualitas	Meningkatnya kualitas layanan Aparatur.SKM aparatur, Nilai Sakip, Meningkatkan persentase PBB, pajak lainya dan Restribusi, persentase Desa Mandiri dan Indeks kepuasan Masyarakat

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Mewujudkan Kecamatan Jombang	Indeks Pelayanan	Meningkatnya Kualitas	SKM Aparatur	95	Program Penunjang Urusan	Meningkatkan Pelayanan	100%				

Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	nan Publik (IPP)	Layanan Aparatur			Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi dan Oprasioanal Kecamatan					
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan Kecamatan Jombang	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	13 org/ Bln	2.277.470.966
					Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	100%	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			664.092.000.
					Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan					
						Prosentase Terlaksanya kegiatan Musrenbang	100	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan		503.052.600.

					Desa dan Kecamatan dengan baik, dan terlaksananya Kegiatan Rutin TP PKK Tingkat Kecamatan dengan baik		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	yang Berpartipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
					Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100				
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan koordinasi/ sinergi dengan PD yang tugas & fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan		395.766.000.

									dan/atau Kepolisia n RI		
					Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum			Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan			10.670.400

Nomor: 03 Desember 2023
CAMAT JOMBANG

NURYADI, S.STP
 NIP. 19801124 200112 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JOMBANG

JL . Ahmad Yani NO.104 ☎ (0336) 322155 JOMBANG
Kode Pos : 68168

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023

URAIAN	SASARAN		PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Ket
	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA/ OUTPUT	SATUAN	TARG ET	
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	SKM Aparatur	Tw 1: 23	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	Tw 1: 13 Tw 2: 13 Tw 3: 13 Tw 4: 13	
		Tw 2: 46		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok. Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Dokumen	Tw 1:1 Tw 2:1 Tw 3:1 Tw 4:1	
		Tw 3: 69	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	Tw 1: 1 Tw 2: 1 Tw 3: 1 Tw 4: 1	
		Tw 4: 95	Pemeliharaan Barang Milik	Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	Kendara-an	Tw 1: 1 Tw 2: 1	

			Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya		Tw 3: 1 Tw 4: 1	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kendara-an	Tw 1:3 Tw 2:3 Tw 3:3 Tw 4:3	
Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi	Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	Tw 1: 25 % Tw 2:50 % Tw 3:75 % Tw 4:100 %	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	Tw 1: 1 Tw 2: 1 Tw 3: 1 Tw 4: 1	
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Laporan	Tw 1: 1 Tw 2: 1 Tw 3: 1	

daerah			Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Tw 4: 1	
Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.	Persentase Desa Mandiri	Tw 1: 25 % Tw 2: 50 % Tw 3: 75 % Tw 4: 100 %	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	Tw 1 : 4 Tw 2:0 Tw 3:0 Tw 4:0	
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Tw 1: 1 Tw 2: 1 Tw 3: 1 Tw 4: 1	
			Program Koordinasi	Koordinasi/Sinergi Dengan	Jumlah Laporan koordinasi/ sinergi	Laporan	Tw 1: 1 Tw 2: 1	

			Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	dengan PD yang tugas & fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian RI		Tw 3: 1 Tw 4: 1	
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------	--



Jember, 03 Desember 2023
CAMAT JOMBANG

[Handwritten signature]

NURYADI, S.STP

NIP. 19801124 200112 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN JOMBANG

Jl. Ahmad Yani No. 104 Telp. (0336) 322155 Jombang

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURYADI, S.STP.

Jabatan : Camat Jombang

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 21 November 2023

Pihak Pertama

CAMAT JOMBANG

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.



NIP.19801124 200112 1 003

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023 KECAMATAN JOMBANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Jombang	Persentase Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum Serta Ketentraman Masyarakat	100%
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan Jombang	IKM	85
3.	Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Jombang	Persentase Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	100%
4.	Terselenggaranya Pemerintahan Kecamatan Jombang	Nilai Sakip	B

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.321.886.527	P – APBD
2. Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 649.823.800	P – APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 48.327.600	P – APBD
4. Program Koordinator Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 398.186.700	P – APBD
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 9.230.400	P – APBD
Jumlah	Rp. 3.427.455.027	P – APBD

BUPATI JEMBER,

 Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Jember, 21 November 2023
 CAMAT JOMBANG

 NURYADI, S.STP.
 NIP. 19801124 200112 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JOMBANG

Jl. AHMAD YANI NO. 104 TELP. 0336-322155 JOMBANG 68168

KEPUTUSAN CAMAT JOMBANG

KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/ ~~25~~ /35.09.19/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN JOMBANG

KABUPATEN JEMBER

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jombang Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Jombang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jombang Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jombang Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** dan **KEDUA** bertujuan untuk :

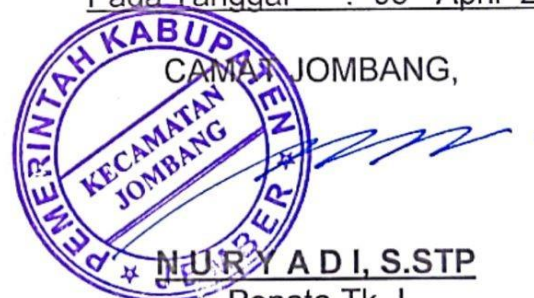
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jombang Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Camat Jombang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada Tanggal : 05 April 2023



NURYADI, S.STP

Penata Tk. I

NIP. 19801124 200112 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER

Tugas :

- a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Fungsi :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Penanganan konflik sosial;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;

- i. Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- q. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tujuan

1. Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan Jombang dalam Pelayanan Publik
2. Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Wilayah Kecamatan Jombang

Indikator Tujuan :

1. Hasil survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN JOMBANG**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Tersedianya 4 Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah 1. LAKIP 2. RB 3. ANJAB 4. Pelayanan Publik	Camat	-
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Penilaian Pelayanan oleh Masyarakat melalui Sistem Informasi	- Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib	SUKMA-E
3.	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan}} \times 100\%$	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarat yg diselesaikan.}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarat yg masuk}} \times 100\%$	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarat di kecamatan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD		- Camat	Hasil review dokumen SAKIP Perangkat Daerah
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Jumlah indikator program yang tercapai. $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah indikator program}} \times 100\%$	Sekcam	LAKIP



05 April 2023
CAMAT JOMBANG,

NURYADI, S.STP
Penata Tk. I

NIP. 19801124 200112 1 003

DAFTAR LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1
Matrik Rencana Strategis (RS) 2021 – 2026**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan dalam Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatnya Aparatur yang berintegritas dan profesional	% tingkat kepuasan aparatur terhadap pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar kantor	72	74	76	77	79	80	Peningkatan Kinerja aparatur	Efektivitas kerja aparatur	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam bidang pelayanan	95	95	96	97	98	99	Orientasi Pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat	Peningkatan Dukungan bagi peningkatan kapasitas / kinerja pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum

2	Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan dan Desa	% rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	1. % Rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketertiban umum, pemerberda yaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	100	100	100	100	100	100	100	Optimalisasi kegiatan bersama penyelenggara Pemerintahan dan Masyarakat	Membangun koordinasi antar penyelenggara pemerintah dan masyarakat	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan
				2. % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100				



Jember, Januari 2023
CAMAT JOMBANG

NURYADI, S.STP

Pejabat Tk.I

NIP. 19801124 200112 1 003

